

Usuan Bidang Tenaga Kerja

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan. Dengan melaksanakan 2 Program, 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan Rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan urusan Tenaga Kerja. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Usuran,Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	2.379.908.168	2.082.784.049
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.189.900	1.189.900
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.189.900	1.189.900
2.07.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.189.900	1.189.900

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan/sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Usuran Tenaga kerja adalah sebagai berikut :

I. Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi

Pada Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.379.908.168 dan realisasi keuangan Rp. 2.082.784.049 atau 87,52% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 90,64%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan teknisi Sepeda motor, menjahit dan barber shop

dengan capaian kinerja berupa jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan kompetensi pada tahun 2025.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Wilayah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.189.90,- dan realisasi keuangan Rp. 1.189.90 atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dengan telah dilatihnya pencari kerja sebanyak orang yang terdata dalam data P3KE Kabupaten lima Puluh Kota pada tahun 2025.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASLAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
				Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	176 Orang	347 Orang		
				Program Penempatan Tenaga Kerja				
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	11 Orang	28 Orang		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Urusan Bidang Perindustrian

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan Pilihan Perindustrian. Dengan melaksanakan 3 Program, 9 Kegiatan dan 20 Sub. Kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan perindustrian. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan,Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
3 31 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.921.613.845	3.849.570.493
3 31 01 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
3 31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000
3 31 01 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.723.783.273	3.654.998.902
3 31 01 2.02 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.722.783.273	3.654.011.902
3 31 01 2.02 0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.000.000	987.000
3 31 01 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	992.000
3 31 01 2.05 0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1.000.000	992.000
3 31 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.567.984	31.369.600
3 31 01 2.06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.497.000	2.480.000
3 31 01 2.06 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	7.433.000	7.332.000
3 31 01 2.06 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggaandaan	3.204.984	3.204.600
3 31 01 2.06 0008	Fasilitasi kunjungan tamu	3.480.000	3.400.000
3 31 01 2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	14.953.000	14.953.000
3 31 01 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000	4.800.000
3 31 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.	4.800.000	4.800.000
3 31 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.375.400	125.612.391

3 31 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.063.400	41.672.703
3 31 01 2.08 0004	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	84.312.000	83.939.688
3 31 01 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.087.188	30.797.600
3 31 01 2.09 0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26.487.166	25.197.600
3 31 01 2.09 0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.850.000	4.850.000
3 31 01 2.09 0009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	750.022	750.000
3 31 02	Program : Perencanaan dan pembangunan industri	14.801.700	14.791.292
3 31 02 2.01	Kegiatan; Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota	14.801.700	14.791.292
3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	731.000	731.000
3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	6.908.200	6.902.592
3 31 02 2.01 0006	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	7.162.500	7.157.700
3 31 04	Program : Pengelolaan sistem informasi industri nasional	107.451.700	107.018.943
3 31 04 2.01	Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	107.451.700	107.018.943
3 31 04 2.01 0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	6.166.000	6.151.000
3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	101.285.700	100.867.943

B. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp.

1.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,98%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersediannya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.723.783.273 dan realisasi keuangan Rp3.654.998.902 atau 98,15% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), adapun jumlah PNS sebanyak 36 orang dan PPPK sebanyak 7 orang, dengan capaian kinerja berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan realisasi keuangan Rp.987.000,- atau 98,70%.. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.992.000 atau 99,60% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersediannya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu 1 dokumen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.497.000 dan realisasi keuangan Rp. 2.480.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,32%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersediannya administrasi pelayanan umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu 1 paket.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.433.000 dan realisasi keuangan Rp.7.323.000 atau 98,64% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersediannya bahan logistik kantor, dengan capaian kinerja berupa jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yaitu 1 paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.204.984 dan realisasi keuangan Rp.3.204.600 atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersediannya bahan cetakan dan penggandaan kantor, dengan capaian kinerja berupa jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yaitu 1 paket.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.480.000 dan realisasi keuangan Rp.3.400.000 atau 97,70% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelayanan kunjungan tamu, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yaitu 1 laporan.

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.953.000 dan realisasi keuangan Rp. 14.953.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya administrasi pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu 1 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000 dan realisasi keuangan Rp.4.800.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yaitu unit.

6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.063.400 dan realisasi keuangan Rp.41.672.703 atau 96,77 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yaitu terbayarnya telpon/internet dan Listrik selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yaitu 1 laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.312.000 dan realisasi keuangan Rp.83.939.668 atau 99,56 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor yaitu terbayarnya honor THL selama 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan yaitu 1 laporan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.487.166 dan realisasi keuangan Rp.25.197600 atau 95,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan yaitu BBM kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan serta suku cadang kendaraan dinas.

dengan capaian kinerja berupa jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yaitu sebanyak 2 unit roda 4 dan 14 unit roda 2.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.850.000 dan realisasi keuangan Rp4.850.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya, dengan capaian kinerja berupa jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yaitu AC, Komputer dan Printer.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000 dan realisasi keuangan Rp.750.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 25,08%. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja berupa jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab yaitu 2 unit.

II. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.731.000 dan realisasi keuangan Rp.731.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 36,95%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry yaitu 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.908.200 dan realisasi keuangan Rp.6.902.592 atau 99,92% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry yaitu 1 Dokumen.
- c. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.162.500 dan realisasi keuangan Rp.7.157.700 atau 99,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya penyusunan dan evaluasi Pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri yaitu 1 Dokumen

III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.166.000 dan realisasi keuangan Rp.6.151.000 atau 99,76% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil desiminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas yaitu 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Data Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.285.700 dan realisasi keuangan Rp. 100.867.943 atau 99,59% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,85%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan kegiatan Dekranasda Kab. Lima Puluh Kota berupa terikutinya promosi/pameran produk IKM Kabupaten Lima Puluh Kota di Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan capaian kinerja berupa jumlah dokumen hasil desiminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas yaitu 1 dokumen.

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASLAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Penyusunan Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	43 org/ 14 bulan	43 org/ 14 bulan		
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan		
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

			Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen		
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket		
			Penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	1 paket		
			Penyediaan barang cetakan dan penggaandaan	1 paket	1 paket		
			Fasilitasi kunjungan tamu	1 paket	1 paket		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan		
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.	1 unit	1 unit		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang				

				Urusan Pemerintah Daerah				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	1 laporan		
				Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	1 laporan	1 laporan		
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	5 unit		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	30 unit		
				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit		
				Program : Perencanaan dan pembangunan industri				

				Kegiatan; Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota				
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 dokumen	1 dokumen		
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 dokumen	1 dokumen		
				Program : Pengelolaan sistem informasi industri nasional				
				Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabuatrn/Kota				

				Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	1 dokumen	1 dokumen		
				Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen		

D. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Urusan Bidang Transmigrasi

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD utama/pendukung pelaksana urusan transmigrasi. Dengan melaksanakan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan transmigrasi. Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan,Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
3 32 04	Program : Pengembangan kawasan transmigrasi	968.800	968.800
3 32 04 2.01	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	968.800	968.800
3 32 04 2.01 01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	968.800	968.800

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian

- a. Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.968.800 dan realisasi Rp. 968.800,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman..

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No.	OPD	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
				Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian				
				Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	20 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	Pemotongan Anggaran	

D. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat sedikit permasalahan yaitu pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi anggaran yang mengakibatkan realisasi jauh dibawah dari target awal yang ditetapkan. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan dapat dicapai secara berimbang, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.